

PUBLICIO
(Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial)

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK**
(Studi Pada Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup Kota Probolinggo)

Erlinda Puspitasari^{1*}, Gunawi²

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo

Abstrak:

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Sampah-sampah yang tidak berguna ini dikelola dengan sedemikian rupa agar menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Dimana obyek penelitian tersebut berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Ungup- Ungup Kota Probolinggo.

Kata kunci: Peran pemerintah, Pengelolaan, Sampah Organik, TPS

Abstract :

In daily life, community did not out of economic activities that negatively impact on problem of environment caused with the emergence of garbage. If funds bad and not dealt with good, it will cause pollution and a threat to health. This study aims to determine the role of the Environmental Office of Probolinggo City in the management of organic waste. As for the background of this writing because in everyday life, people can not be separated from economic activities that have a negative impact on environmental problems caused by the emergence of waste. If the management is poor and not handled properly, it will cause pollution and become a threat to health. These useless trashes are managed in such a way as to be something of economic value.

This study uses qualitative research methods, where the authors make observations, interviews, literature studies and documentation directly to the object under study. Where the object of research is located in Garbage Disposal Ungup- Ungup Town Probolinggo.

Keywords: *the Role of Government, management, organic waste, landfill*

Alamat Korespondensi Penulis:

Email : erlindapuspitasari@upm.ac.id

Alamat : Universitas Panca Marga

Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu Kode Pos
(67271)

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan

pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Pada masa mendatang, sampah akan menjadi masalah serius karena faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sampah seperti jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat, keadaan sosial ekonomi serta kemajuan teknologi akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Sampah merupakan masalah utama bagi masyarakat dan lingkungan khususnya bagi masyarakat perkotaan, dimana hampir semua kegiatan dipastikan menghasilkan sampah. Salah satu contoh adalah plastik pembungkus makanan, dimana plastik pembungkusnya merupakan kategori sampah kering yang biasa disebut sampah non organik, sedangkan sisa makanannya disebut sampah basah atau sampah organik. Sampah non organik biasanya sangat sulit untuk diurai secara alami karena dipastikan membutuhkan waktu yang lama dan sangat mencemari lingkungan. Hal yang mungkin dilakukan adalah dengan cara mendaur ulang sampah. Namun proses daur ulang membutuhkan sistem yang sangat rumit dan teknologi yang mumpuni, mulai dari proses pemilahan sampah organik dan non organik. Sampah yang tidak dapat penanganan serius bisa mengakibatkan pencemaran, baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah.

Untuk itu perlu adanya suatu upaya jelas dalam pengelolaan sampah agar sampah tidak menjadi timbunan yang menyebabkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya. UU RI No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pola lama dalam pengelolaan sampah di Indonesia yang berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan mulai bergeser berubah menjadi pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan residu. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan menyebutkan bahwa pengurangan sampah yang dimulai dari sumbernya merupakan hal yang harus diperhatikan dan mulai digalakkan.

Penanganan terhadap sampah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak (Dwiyatmo, 2007). Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan khususnya dengan menyelamatkan lingkungan agar tidak tercemar oleh emisi yang berasal dari sampah. Di Indonesia sebenarnya mengikutsertakan peran institusi formal, warga

pemukiman, dan sektor formal dalam mengelola sampah (Tim Penebar Swadaya, 2008).

Untuk mengatasi volume meningkatnya sampah khususnya di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo membentuk lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Sampah dan Limbah untuk menangani proses pengolahan sampah organik menjadi kompos yang berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

UPT Pengolahan Sampah dan Limbah bertanggungjawab melaksanakan dua fungsi pokok, yaitu melayani pengolahan sampah menjadi produk yang bermanfaat dan mendesiminasikan pengolahan sampah dan pemanfaatannya sebagai bentuk pemberdayaan komunitas dan pendidikan. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah memiliki lahan percontohan/ demplot di beberapa tempat yaitu area persawahan Kelurahan Jrebeng Kulon seluas 4.000 m², di ungu-ungup Kelurahan Kanigaran dan pembibitan di area UPT PS-L. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah telah melakukan uji coba beberapa bibit tanaman dengan menggunakan pupuk organik hasil dari olahannya sendiri diantaranya : sawi, kacang panjang, cabai, jagung manis dan bawang merah. Dari uji coba tersebut diharapkan hasil panen nantinya akan menjadi percontohan bagi petani-petani di Kota Probolinggo.

UPT PS-L mengenalkan penggunaan dan manfaat dari produk pupuk organik olahannya kepada masyarakat maupun kepada petani dengan cara menunjukkan hasil penanaman yang telah diuji cobakan di lahan- lahan percontohannya. Hal ini bertujuan untuk membangun kepedulian masyarakat/petani untuk menggunakan pupuk kompos agar meningkatkan produksi sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Selain menjadi lahan percontohan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung Program Pemerintah Kota Probolinggo yaitu "Menuju Kota Probolinggo sebagai Kota Pertanian Organik". Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "**Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dalam Pengelolaan Sampah Organik di TPS Ungup-Ungup**".

PUBLICIO

(Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik di TPS Ungup- Ungup?.”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik di TPS Ungup-Ungup.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Husein Umar, 1999). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti status sekelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik di Kota Probolinggo.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contohnya adalah catatan atau dokumentasi yang ada di dinas, laporan, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitiannya terdiri dari pedoman wawancara, peneliti sendiri, dan alat penunjang seperti laptop, alat tulis menulis, handphone dan komputer atau laptop. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dalam Pengelolaan Sampah Organik di TPS Ungup – Ungup

Peran DLH Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik di TPS Ungup-Ungup meliputi:

Pengaturan Sampah Rumah Tangga

Pada dasarnya, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan sampah. Menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa TPS Ungup - Ungup mempunyai peran yang sangat penting dalam pengaturan sampah rumah tangga diantaranya adalah menjadi tempat pengumpulan sampah rumah tangga yang ada di RT RW, di kelurahan- kelurahan yang terdekat dengan areal TPS ini. DLH juga melakukan pengaturan sampah rumah tangga dengan membuat kebijakan agar masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini dilakukan oleh DLH sesuai dengan UU dan Perda yang berlaku tentang sampah. Tidak hanya kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh DLH untuk mengatur sampah rumah tangga, DLH juga sering melakukan sosialisasi- sosialisai kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya memilah sampah dari timbulannya, merecycle sampah dari timbulannya, serta memanfaatkan kembali sampah yang berasal dari rumah tangga. Dengan harapan dengan segala kebijakan dan sosialisasi yang dilakukan oleh DLH maka kita bisa mengurangi volume sampah yang ada di TPS Ungup- Ungup. DLH sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam pengaturan sampah rumah tangga, dengan menerapkan pengolahan sampah berbasis masyarakat yaitu 3 R (*Reduce*,

Reuse, Recycle). Untuk sampah rumah tangga yang tidak dapat dilakukan pengolahan dengan 3 R, maka akan diangkut ke TPA untuk dibakar (*inceneration*).

Kegiatan Daur Ulang

Untuk kegiatan daur ulang sampah, TPS Ungup- Ungup hanya melakukan proses daur ulang dari sampah organik, yaitu sampah yang diproses menjadi pupuk organik atau kompos. Sedangkan sampah anorganiknya akan diangkut ke TPA. Sampah anorganik dibagi menjadi dua yaitu layak jual dan layak kreasi. Yang layak jual akan langsung dijual ke pengepul, sedangkan yang layak kreasi akan di daur ulang dijadikan kerajinan tangan atau ketrampilan. Dengan adanya daur ulang sampah ini, akan mengurangi terjadinya penumpukan sampah dan pembakaran sampah pada proses akhir. Pada TPS Ungup-Ungup penanganan sampah sudah dilakukan dengan tepat yaitu memilah sampah organik kemudian mengolah dan memprosesnya menjadi kompos. Kompos ini kemudian akan dijual kembali kepada masyarakat, ada pula yang dibagi secara gratis karena masyarakat ini telah bekerjasama dengan DLH dalam melakukan pengumpulan sampah daun. TPS Ungup – Ungup telah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan menjadikan TPS tersebut sebagai sarana pengumpulan sampah di lingkungan sekitarnya kemudian mengolah dan memprosesnya menjadi kompos, hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Proses daur ulang sampah organik pun sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu, melalui tahapan- tahapan pencacahan, penumpukan bahan yang akan dijadikan kompos, pembalikan bahan agar proses fermentasi merata, pemantauan suhu dan kelembapan tumpukan, panen dan pengeringan, penggilingan, pengayaan, kemudian pengemasan.

Kerjasama dalam Pengelolaan Sampah

Dalam hal ini DLH berperan aktif dengan masyarakat maupun kelompok masyarakat, seperti contohnya komunitas- komunitas Bank Sampah, Papesa (Paguyuban Peduli Sampah), Forjamansa (Forum Jaringan Masyarakat Peduli Sampah), PGS Ceria (Paguyuban Gerobak Sampah) yaitu petugas- petugas sampah yang ada di RW RW. Dengan menjalin kerjasama dengan kelompok – kelompok masyarakat ini, DLH bisa melakukan sosialisasi kepada

masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang yang akan menjadi sampah anorganik. Menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah, jadi masyarakat sudah diajak sejak dini untuk menjaga lingkungan dari penumpukan sampah baik organik maupun anorganik. Dengan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh DLH ini, akan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS Ungup- Ungup, karena masyarakat sudah diajak untuk melaksanakan 3 R yaitu Reduse, Reuse dan Recycle mulai dari tingkat rumah tangga.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah

Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya dijelaskan oleh Nishimoto (1997). Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, DLH selalu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan dunia usaha. Agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai dari tingkat terbawah. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan melalui berbagai cara yaitu sosialisasi, mengeluarkan regulasi- regulasi tentang pengelolaan sampah, sehingga ada aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Namun tidak dijelaskan apakah ada sanksi apabila ada masyarakat dan dunia usaha yang tidak mematuhi regulasi- regulasi dan kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Sehingga tidak ada efek jera bagi masyarakat ataupun dunia usaha apabila terjadi pelanggaran. Hal ini harusnya lebih ditekankan, mengingat tingkat kesadaran masyarakat yang begitu rendah. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang ketat dari Pemerintah, dalam hal ini DLH, maka pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat baik rumah tangga

PUBLICIO

(Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial)

maupun dunia usaha akan terorganisir dengan baik.

masyarakat dan dunia usaha mematuhi peraturan dalam pengelolaan sampahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik, meliputi :

1. Pengaturan Sampah Rumah tangga
Dalam hal pengaturan sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup sudah mengatur bahwa sampah rumah tangga akan dikumpulkan di TPS – TPS yang ada di Kota Probolinggo. Untuk TPS Ungup- Ungup sendiri akan menjadi tempat penampungan sementara bagi sampah – sampah baik dari rumah tangga maupun sampah dari dunia usaha yang ada disekitar areal TPS Ungup – Ungup, yaitu meliputi kelurahan – kelurahan yang ada di Kecamatan Kanigaran.
2. Kegiatan Daur Ulang
Untuk proses daur ulang sampah, Dinas Lingkungan Hidup mengatur bahwa sampah organik diproses dan diolah menjadi kompos atau pupuk organik di TPS Ungup – Ungup. Sedangkan sampah yang anorganik, ada dua perlakuan, sampah layak jual akan langsung dijual ke pengepul, sedangkan sampah yang layak kreasi akan dijadikan ketrampilan.
3. Kerjasama dalam Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan kerjasama dengan masyarakat dan kelompok – kelompok masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup membentuk Papesa, Forjamansa, PGS Ceria, dan Bank Sampah yang kesemuanya dikelola dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini, maka sosialisasi dan tindakan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat akan lebih tersentuh.
4. Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan sampah melalui kader- kader. Kader- kader yang sudah dibentuk tadi selalu dibina dan diberikan pengarahan agar program- program Pemerintah Kota Probolinggo dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah bisa sampai kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga selalu memantau pengelolaan sampah di dunia usaha, mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar

SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti mengajukan saran:

1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan sosialisasi dan inovasi agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara maksimal mulai dari timbulannya (terutama sampah rumah tangga).
2. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup mampu memaksimalkan daur ulang sampah organik di TPS Ungup- Ungup.
3. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup mampu terus menjaga kerjasama dengan masyarakat, baik masyarakat pada umumnya ataupun kelompok masyarakat / kader- kader Dinas Lingkungan Hidup pada khususnya.
4. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus dan terjadwal sehingga program atau wacana- wacana yang dibuat oleh Pemerintah dapat berkelanjutan, tidak hanya baik dan semangat diawal tapi berhenti dan tidak berjalan setelahnya.
5. Diharapkan Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi yang tegas bagi orang- orang yang membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Husnaini Usman dan Purnomo Setiady. 2000. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research Jilid IV*.Jogjakarta : Andi Offset.
- Hadiwiyoto, Soewedo. 1983. *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta : PT Inti Idayu Press.
- Hasim, F & Hediando, Y.E. 2010. *Gerakan 3R, Pembentukan Masyarakat Peduli Daur Ulang*. Bandung : Indonesian Education Promoting Foundation.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, edisi revisi*.Jakarta : penerbit PPM.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Mustopadidjaja, AR, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik , Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : LAN.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sofian, Masri Singarimbun dan Effendi. (editor) 1997. *Metode Penelitian Survei.Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta
- Tim Penebar Swadaya. 2010. *Penanganan & Pengolahan Sampah*. Jakarta : Penebar Swadaya
- Tim Penulis PS. 2008. *Penanganan Dan Pengolahan Sampah*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Umar, Husein. 1999. *Metode Penelitian : aplikasi dalam pemasaran*. Jakarta : Gramedia.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman, Husaini & R. Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Pengantar Statistika*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.